



BULETIN MAHASISWA UNNES

EXPRESS

ISSN:
0216-5589

November
2020

Edisi Spesial Dari UU Kisruh Hingga Aksi Rusuh



16 GAZEBO

MENAFSIRKAN POSTER DEMO
TOLAK OMNIBUS LAW

18 RESENSI

MENILIK RAHASIA
TULISAN TEMPO

20 FOTO ESAI

BINGKAI AKSI TOLAK OMNIBUS
LAW DI SEMARANG

Susunan Redaksi

Pembina : Dhoni Zusti-
yantoro, S.Pd., M.Hum
Penanggung Jawab
: Afsana Noor Maulida
Zahro

Pemimpin Redaksi :
Diki Mardiansyah

Redaktur Pelaksana:
Muhammad Fikri

Reporter : Manan, Laili,
Alisa, Iis, Alfian, Nazhira,
Mita, Wimar

Editor : Diki, Laili,
Manan

Fotografer : Wimar,
Lalu, Doni, Adam

Layouter : Alfian

Ilustrator : Gallah,
Hasna, Amilia

Alamat Redaksi : Ge-
dung UKM Lantai 2 Kam-
pus Sekaran, Gunungpati,
Semarang, 50229

Surel : bp2mexpress@
gmail.com

Situs Daring : www.
linikampus.com

Publikasi :
081239867533

WA Sivas :
085641794352

Daftar Isi

Editorial	3
Laporan Utama	5
Opini	8
Kelana	11
Sosok	14
Gazebo	16
Resensi	18
Foto Esai	20
Cerpen	22

Laporan Utama 5

Dari UU Kisruh Hingga Aksi Busuh

Aksi penolakan Omnibus Law di Semarang tidak hanya terjadi beberapa waktu yang lalu. Sejak pertengahan Maret, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Jawa Tengah, telah melakukan aksi yang sama. Kala itu, aksi dilakukan untuk menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang masih digarap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Opini 8

Pernikahan Anak: Bukan dan Tidak Akan Pernah Menjadi Solusi

Hidup berpasangan dan menikah menjadi warisan turun temurun nenek moyang. Pernikahan dianggap suatu kewajiban dan keharusan untuk dicapai.

Kelana 11

Bagian Tersembunyi Goa Sunyaragi

Dengan beragam destinasi wisata yang ditawarkan, tak heran jika Kota Cirebon acapkali menjadi tujuan utama saat musim libur tiba. Ada banyak destinasi wisata yang menarik untuk dieksplorasi. Salah satu yaitu Gua Sunyaragi.

Tempat ini menjadi rekomendasi bagi mereka yang ingin berwisata di tempat yang sarat dengan nilai sejarah. Gua Sunyaragi menjadi warisan budaya Wewengkon Keraton Kesepuhan Cirebon.

Cerpen 22

Lela Lela Ledhung

“Tak lela... Lela... Lela ledhung.”

Terdengar sayup-sayup lantunan lagu di tengah derasnya hujan.

“Tak lela... Lela... Lela ledhung,” lagi-lagi, ia melantunkan lagu itu.

“Tak lela... Lela... Lela ledhung,” bibir itu masih merapal lagu yang sama.

Negara Tak Berpihak Pada Rakyat dan Omnibus Law Membuatnya Kian Parah

Alih-alih kebebasan berpendapat, tindakan yang mengarah pada represi dan pembungkaman justru nyata terlihat.

Di tengah pagebluk Covid-19 yang semakin tidak jelas penanganannya, pemerintah dan badan legislatif malah menyiapkan ‘pandemi’ lain. Melalui RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, dalih pemerintah dan badan legislatif dengan menyiapkan undang-undang guna membuka berbagai lapangan kerja baru, sepertinya patut dipertanyakan. Apalagi di tengah lesunya ekonomi dunia akibat pandemi ini.

Proses pembahasan undang-undang terkesan menjauhi publik. Pun dengan minimnya partisipasi publik, undang-undang ini dikebut kurang dari delapan bulan setelah penyerahan draf dari lembaga eksekutif ke lembaga legislatif. Bahkan, draf rancangan undang-undang ini tidak dibuka kepada publik.

Padahal, partisipasi publik telah diatur dalam Bab XI Pasal 96 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa masyarakat boleh memberikan masukan baik secara tertulis

maupun lisan, terutama mereka yang memiliki kepentingan atas substansi dari RUU tersebut. Namun, masukan-masukan itu (seolah) tidak pernah didengarkan dan legislatif menutup rapat “telinga” mereka terhadap suara-suara penolakan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

RUU Omnibus Law bermasalah baik secara proses pembentukan, metode pembentukan, dan substansinya. Secara proses, RUU Omnibus Law dirumuskan secara tidak transparan dan minim partisipasi publik. Bahkan, sejak awal penyusunannya, RUU Omnibus Law dikritisi karena minimnya keterbukaan dan partisipasi publik.

Padahal, dalam suatu pembentukan produk hukum, partisipasi publik dan aspirasi masyarakat merupakan suatu hal yang penting. Argumentasi tersebut diperkuat oleh laporan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, yang menyatakan bahwa Omnibus Law memiliki karakteristik khusus yang dapat membahayakan demokrasi.

Penerapan konsep ini dapat disusupi oleh banyak kepentingan, oleh karena itu, DPR dan pemerintah harus membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat secara luas. Tetapi, hingga disahkannya RUU Omnibus Law, publik dan masyarakat terutama buruh tidak cukup mendapatkan informasi dan terlibat dalam proses pembentukannya.

Publik merupakan subjek dari berlakunya undang-undang yang harus berpartisipasi di dalamnya. Masyarakat harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan, tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Menurut Nonet dan Selznick, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus terlihat pada proses pembentukannya yang partisipatif dengan mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu atau pun kelom-

pok masyarakat, selain itu juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat.

Penolakan terhadap suatu undang-undang sejatinya tidak akan terjadi apabila aspirasi rakyat terakomodasi dengan baik dalam pembentukan. Ketika suatu kebijakan tidak aspiratif, maka dapat muncul kecurigaan mengenai kriteria dalam menentukan siapa mendapat apa. Sebaliknya, proses pengambilan kebijakan yang dilakukan dengan cara terbuka dan didukung dengan informasi yang memadai, akan memberikan kesan bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan.

Sepintas, Omnibus Law memang baik untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak. Namun tanpa adanya upaya lain, masalah disharmoni, ego sektoral sampai masalah regulasi yang tidak partisipatif, tentu penerapan Omnibus Law pun tidak akan efektif dan menjadi ancaman kemanusiaan dan lingkungan hidup.

Pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law—kini telah menjadi UU, kian menjauhi kehendak publik. Berbagai penolakan dari akademisi, tokoh masyarakat adat, hingga rohaniawan telah disuarakan sejak

RUU ini mulai dibahas. Gelombang aksi baik secara langsung maupun melalui media sosial pun terus dilakukan. Lagi-lagi hal itu tak membuat pemerintah dan badan legislatif memilih opsi untuk menghentikan—bahkan sekadar menunda pembahasan RUU tersebut.

Alih-alih kebebasan berpendapat, tindakan yang mengarah pada represifitas dan pembungkaman justru nyata terlihat. Banyak masyarakat adat, aktivis, dan mahasiswa dikriminalisasi. Beberapa dari mereka mendapatkan ancaman dari aparat maupun pihak tak dikenal setelah memperjuangkan hak rakyat. Bahkan polisi yang seharusnya menjadi pelindung ketika rakyat menyuarakan pendapat malah mengonter dengan narasi lain.

Semangat desentralisasi yang diusung gerakan reformasi 22 tahun lalu kian rontok akibat pemangkasan berbagai

perizinan yang malah mengembalikan wewenang pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Sentralisasi ini salah satunya dengan menghilangkan keterlibatan daerah dengan penghapusan komisi penilai AMDAL. Omnibus Law ini tentunya akan mencederai reformasi yang hari ini sedang dikorupsi elit politik dan oligarki.

Keresahan-keresahan ini tentu bukan milik kaum kerah biru atau mahasiswa saja. Semua elemen masyarakat harus resah akan kebijakan yang tidak prorakyat. Hari ini kita pantas untuk melawan ketidakadilan dan melawan pembuatan produk hukum yang tidak sesuai kehendak masyarakat.

Produk hukum itu untuk masyarakat dan bukan sebaliknya: masyarakat untuk produk hukum. Mari melawan, karena secara banal dan terang-terangan penguasa merampok rumah dan tanah air kita.

[Redaksi]

**RUU Omnibus Law
bermasalah baik secara
proses pembentukan,
metode pembentukan,
dan substansinya.**

Secara proses, RUU Omnibus Law dirumuskan secara tidak transparan dan minim partisipasi publik. Bahkan, sejak awal penyusunannya, RUU Omnibus Law dikritisi karena minimnya keterbukaan dan partisipasi publik.

Dari UU Kisruh Hingga Aksi Rusuh

“Bagiku sendiri, politik adalah barang yang paling kotor. Lumpur-lumpur yang kotor. Tetapi, suatu saat di mana kita tidak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah.”

Aksi penolakan Omnibus Law di Semarang tidak hanya terjadi beberapa waktu yang lalu. Sejak pertengahan Maret, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSB-SI) Jawa Tengah, telah melakukan aksi yang sama. Kala itu, aksi dilakukan untuk menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang masih digarap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Beberapa hari terakhir, suara-suara penolakan Omnibus Law semakin keras digaungkan. Bahkan, aksi turun ke jalan semakin semarak di berbagai daerah. Tindakan tersebut sebagai buntut pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR pada 5 Oktober lalu. “Dari mosi tidak percaya itu, kita tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah. Maka saat aksi kemarin itu, kita tidak mengharapkan DPR atau gubernur untuk turun menemui massa aksi. Karena kita sudah mendeklarasikan mosi tidak percaya,” tutur Arif Afrulloh—koordinator lapangan (Korlap) aksi, melalui pesan suara (22/10).

Dikutip dari buku *Catatan Seorang Demonstran* yang digarap oleh seorang aktivis kondang di tanah



air—Soe Hok Gie, menuliskan bahwa, “*Bagiku sendiri, politik adalah barang yang paling kotor. Lumpur-lumpur yang kotor. Tetapi, suatu saat di mana kita tidak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah.*” Menurut Gie, mahasiswa, buruh, dan aliansi lainnya terjun ke

jalan membawa aspirasi untuk disampaikan secara langsung, dengan membuka mulut, dengan teriakan-teriakan.

Barangkali, prinsip itu sudah menjadi pegangan secara sadar atau tak sadar bagi mereka—baik dari kalangan mahasiswa, pelajar, buruh, maupun elemen masyarakat lain. Berbagai elemen terjun membawa aspirasi jalan untuk diantarkan langsung kepada para pembuat produk hukum berupa undang-undang, dalam hal ini adalah DPR.

Pada 7 Oktober 2020 lalu, menjadi catatan bagi kami—reporter *Express*, untuk menulis sebuah laporan reportase terkait demonstrasi di Semarang. Sama halnya sejumlah aksi di daerah lain, aksi penolakan UU Cipta Kerja di Semarang juga berujung ricuh. Meskipun tidak sericuh gejolak aksi

saat memperjuangkan reformasi 1998.

Sekitar pukul 09.15 WIB, kami—reporter *Express*, tiba di gedung DPRD Jawa Tengah (Jateng), lantas memarkirkan motor di bagian belakang gedung. Dilihat dari trotoar depan gedung, jalanan masih dipadati oleh kendaraan yang berlalu-lalang. Belum tampak massa aksi. Aparat keamanan pun belum memenuhi area gerbang gedung DPRD Jateng. Hanya satu-dua orang dengan kemeja dan kaos yang sudah bersiap di sekitar gerbang. Sampai akhirnya, sekitar pukul 11.03 WIB, massa aksi mulai datang dari Jalan Pemuda menuju gerbang utama gedung DPRD Jateng. Melihat hal itu, aparat keamanan mulai merapatkan barisan.

Dengan motor gedunya, polisi tampak mengawal para demonstran yang menuju depan gedung. Massa aksi mulai tumpah-ruah di depan gedung DPRD Jateng. Mereka terdiri atas organisasi ekstra kampus, di antaranya barisan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), dan serikat buruh seperti KPBI (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia), KASBI (Kongres Aliansi SerikatnBuruh Indonesia) dan FSPIP (Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan), serta mahasiswa di

berbagai kampus di Semarang.

Tak berselang lama, pukul 11.45 WIB, massa aksi dari kelompok mahasiswa datang. Mereka melebur menjadi satu, mulai memenuhi area sekitar gedung DPRD Jateng. Berdampingan dengan padatnya massa aksi. Tak ketinggalan juga para pedagang keliling yang turut serta memberikan warna pada suasana demonstrasi kala itu.

Di masa pandemi ini, semangat untuk melawan dan menolak UU Cipta Kerja lebih besar dari ketakutan terhadap virus Covid-19 itu sendiri. Hal itu tergambarkan bagaimana para massa aksi melebur menjadi satu dengan tetap menggunakan masker. Meneriakan suara-suara penolakan dalam berbagai bentuk. Poster-poster diangkat tinggi. Dipasang di atas gapura gerbang utama. Diteriakan melalui pengeras suara. Diikuti nyanyian-nyanyian lagu buruh dan darah juang yang menggema. “Untuk yang berkumpul di depan gedung DPRD harap untuk menjaga jarak satu sama lain dan menggunakan masker dengan benar,” teriak polisi melalui pengeras suara.

Teriakan tersebut dibalas dengan teriakan massa aksi yang meminta aparat untuk membuka gerbang DPRD. Alih-alih menanggapi permintaan massa, polisi masih kukuh mengumumkan untuk jaga jarak dan tidak ricuh. Hampir seluruh bagian jalan depan gubernuran sudah padat. Teriakan “DPR goblok” menjadi pembuka kericuhan dari demonstran. Spanduk-spanduk dan poster yang usai dibuat mulai banyak terlihat. “DPR was impostor” dipasang di gardu gerbang. Di sebelahnya, terpampang poster bertuliskan “Otak DPR terbalik”—yang dipajang dengan terbalik.

Karena tak kunjung dibuka, demonstran mulai mendorong pagar.

Andi mahasiswa Universitas Negeri Semarang, yang terkena gas air mata. Wajahnya merah padam. “Saya enggak ngapain, saya enggak ikut rusuh, mau pulang aja saya. Sempat di stop polisi, kunci saya diambil,” tuturnya.

Gerbang gedung DPRD Jawa Tengah berhasil dirobohkan oleh massa pada pukul 12.17 WIB. Massa aksi yang tidak sabar mulai merangsek masuk ke area gedung. Sebagian massa aksi berusaha menenangkan. Di sisi lain, sebagian massa aksi berusaha menekan masuk. Polisi hanya bisa menahan massa. Situasi kembali stabil saat aliansi mahasiswa memberi komando dengan pengeras suara. Di tengah hiruk-pikuk demonstrasi kita hari ini, terdengar kabar ada yang terluca. Seorang kawan kami—dari LPM Dimensi, kepalanya terkena lemparan potongan besi saat gerbang roboh. Ambulan segera membawanya.

Tak berselang lama, datang mobil *pick up* di tengah lautan massa. Dengan satu komando, mereka duduk dan mendengar orasi-orasi yang disampaikan di atas *pick up*. Banyak elemen yang turut menyampaikannya, mulai dari mahasiswa, buruh, dan LSM.

Dikutip dari laman *linikampus.com* (9/10), massa aksi mengatakan bahwa adanya Omnibus Law hanya akan menguntungkan investor. Jelas saja, hal itu akan mematikan UKM yang sedang kalang kabut kala pandemi. Selain itu, mereka juga menyatakan ketidaksetujuan penghapusan ketentuan upah minimum kabupaten atau kota. Sebagai gantinya, pemerintah menetapkan upah minimum provinsi. Pergantian kebijakan ini dinilai akan membuat upah menjadi lebih rendah. Mereka juga menyoroti nasib petani yang semakin sekarat karena dipaksa menggunakan pupuk

pabrik. Terakhir, mereka menuntut adanya demokrasi langsung.

Di tengah orasi—sekitar pukul 15.00 WIB, tak diduga-duga, ada segerombolan oknum pelajar yang melempari batu dan botol ke arah gedung gubernuran. Suasana menjadi memanas. Massa aksi yang semula kondusif mendengarkan orasi, perlahan membubarkan diri. Aparat keamanan mulai menembakkan *water canon* dan gas air mata. Semuanya berlarian ke segala arah. Termasuk kami. Pandangan mulai terhalangi, udara mulai dipenuhi oleh pekatnya gas air mata.

Aksi benar-benar selesai ketika aparat kepolisian mulai membubarkan demonstran dengan paksa. Adekan kejar-kejaran terjadi antara polisi dan demonstran. Mereka berlarian mencari tempat aman, menuju kendaraan-kendaraan mereka untuk melarikan diri. Sayangnya, tidak semuanya bisa meloloskan diri. Polisi melakukan *sweeping*

hingga malam hari. Pukul-memukul terjadi. Maki-memaki dilontarkan. Di suasana itu, tidak ada yang dipedulikan lagi selain keselamatan diri.

Saat terjadi pembubaran paksa, kami bertemu dengan salah satu demonstran—Andi mahasiswa Universitas Negeri Semarang, yang terkena gas air mata. Wajahnya merah padam. Kemeja putihnya lusuh basah. Celana coklatnya kotor. Ia hendak pulang dengan motornya. Tetapi, tertahan oleh polisi yang sudah menghadangnya. “Saya enggak *ngapa-ngapain*, saya enggak ikut rusuh, mau pulang aja saya. Sempat di stop polisi,

Kembali menyadur dari linikampus.com (9/10), penolakan terhadap suatu undang-undang sejatinya tidak akan terjadi apabila aspirasi rakyat terakomodasi. Ketika suatu kebijakan tidak aspiratif, maka dapat muncul kecurigaan mengenai kriteria dalam menentukan siapa mendapat apa.

kunci saya diambil,” tutur Andi.

Kami duduk di antara ibu-ibu yang menunggu anaknya berlatih silat. Dari tempat kami duduk, tampak para polisi yang membawa hasil “*sweeping-annya*”. Suasana berangsur-angsur lenggang. Saat itulah kami tahu bahwa aksi telah benar-benar berakhir. Namun, demonstrasi hari itu meninggalkan buah pahit. Beberapa massa dipukuli, ditangkap. Terjadi tindak kekerasan dan pengrusakan. Tanaman terinjak-injak. Botol dan sampah berserakan sepanjang jalanan.

Kami menyadari, hari-hari kemudian akan terjadi aksi lagi. Persoalan Omnibus Law belum selesai. Dengan munculnya aksi solidaritas beberapa hari kemarin menjadi tanda bahwa aksi penolakan akan terus berlanjut. Masih menjadi catatan terkait tindak lanjut aksi setelahnya.

Kembali menyadur dari *linikampus.com* (9/10), penolakan terhadap suatu undang-undang sejatinya tidak akan terjadi apabila aspirasi rakyat terakomodasi. Ketika suatu kebijakan tidak aspiratif, maka dapat mun-

cul kecurigaan mengenai kriteria dalam menentukan siapa mendapat apa. Sebaliknya, proses pengambilan kebijakan yang dilakukan dengan cara terbuka dan didukung dengan informasi yang memadai, akan memberikan kesan bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan.

Arif menambahkan bahwa pihaknya tahu bahwasannya ada undangan pada rektor-rektor kampus dan ketua BEM, termasuk Unnes pun diundang. Salah satu tindak lanjut itu adalah penelitian klinik pengaduan UU Cipta Kerja., “Kita juga mendesak kampus supaya bisa menyatakan sikap.” Sayangnya, pihak Unnes belum secara tegas menyatakan sikap.

Akhir kata harapan ke depannya, tentunya tak hanya diutarakan kepada pemerintah—selaku wakil rakyat yang diberikan amanat, namun termasuk civitas akademika kampus perguruan tinggi untuk bisa mengkritisi permasalahan ini. Karenanya UU sapu jagat ini tak hanya merugikan di satu sektor saja, namun seluruh sektor pastinya akan mendapat dampaknya—salah satunya pendidikan. Demikian Arif menambahkan.

(Manan, Alfian, Laili)

Opini

Pernikahan Anak: Bukan dan Tidak Akan Pernah Menjadi Solusi

Pernikahan dianggap suatu kewajiban dan keharusan untuk dicapai. Ironisnya, kondisi pernikahan anak di Indonesia cukup memprihatinkan.



Ilustrasi: Gallah

Hidup berpasangan dan menikah menjadi warisan turun temurun nenek moyang. Pernikahan dianggap suatu kewajiban dan keharusan untuk dicapai. Tidak jarang mengorbankan apa-apa yang dimiliki dan juga hal-hal yang seharusnya bisa diraih.

Saat akan menikah, penting untuk melihat kesiapan baik dari segi mental dan finansial. Untuk ukuran usia orang yang dewasa, hal itu jauh lebih mudah. Namun bagi anak-anak yang memilih atau terpaksa menikah di usianya yang belum cukup, tentu bukan perkara gampang. Perlu diketahui bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan minimal berusia 19 tahun, hal ini berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019.

Sebelumnya jangan membayangkan anak-anak hanya mereka di usia sebelum sepuluh tahun. Sebenarnya usia anak dimulai dari dalam kandungan sampai umur 18 tahun. Ini terikat secara hukum pada pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini berarti bahwa remaja awal dan menengah masih tergolong anak-anak.

Kondisi pernikahan anak di Indonesia cukup memprihatinkan. Menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2018 terdapat 1.2 juta perkawinan anak. Dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama mempermulus jalan menuju pernikahan anak. Keberadaannya memang menjadi polemik. Jika dihilangkan maka akan banyak kasus pernikahan anak yang tidak dicatat. Namun ketika ada pun tidak banyak mengubah situasi.

Ketika anak-anak memutuskan atau dipaksa menikah di usianya, mereka akan banyak kehilangan dan merelakan apa-apa yang menjadi mimpinya. Di usia remaja awal maupun menengah, tubuh sedang menyempurnakan sistem reproduksi. Bagi perempuan, hamil dan melahirkan di usia yang masih belum

siap memiliki risiko yang lebih tinggi. Diantaranya keguguran, pendarahan, persalinan prematur atau kemungkinan terburuk kematian pada ibu maupun bayinya.

Meskipun begitu, anak terkadang dihadapkan pada pilihan sulit: tunduk untuk menikah atau dianggap membangkang. Tentu anak kebanyakan memilih menikah karena tidak ada pilihan lain baginya. Pemicunya bisa karena masalah ekonomi, tradisi turun temurun yang terjadi di lingkungan keluarga/adat, alasan untuk menghindari zina, serta alasan lain.

Tidak Semua Anak Memiliki Lingkungan Baik dan Sehat

Berbicara tentang pernikahan anak tidak pernah lepas dari lingkungan yang membentuknya. Jangan membayangkan semua anak memiliki lingkungan yang baik dan sehat. Ada banyak lingkungan yang mengelilingi anak entah baik atau buruk. Anak ada pada salah satunya. Lingkungan tidak hanya keluarga, akan tetapi menyekut pertemanan dan masyarakat sekitar. Sekali lagi, sebagian anak lahir dan besar bisa jadi di lingkungan yang carut marut tak karuan.

Anak bisa saja menikah di usianya karena keluarga yang mendesak. Entah dengan dalih kesulitan ekonomi maupun sudah waktunya menikah. Padahal mereka baru “kemarin” mengalami ma-

Sejalan dengan pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Partisipasi dalam hal apapun tak terkecuali dalam menentukan pernikahan dirinya.

sa-masa menstruasi. Ditambah lagi dengan stigma suatu kelompok masyarakat yang menganggap seorang harus segera menikah sebelum waktunya lewat. Padahal umur mereka baru belasan tahun, tidak lebih dari delapan belas tahun. Misalnya yang terjadi pada Sutik asal Rembang yang dilansir dari *dw.com* pada 16 November 2019. Ia berusia 11 tahun saat dijodohkan dan itu menjadi tradisi turun temurun. Ditambah stigma bahwa ketika ada seseorang yang melamar perempuan tak terkecuali masih anak-anak harus diterima. Jika menolak konsekuensinya tidak laku-laku.

Menyangkut kesulitan ekonomi, menikah menjadi solusi cepat dan praktis. Dengan menikah tanggung jawab keluarga untuk membesarkan seorang anak pun akan lepas. Padahal belum tentu mereka menikah dapat mengurus apa-apa yang akan terjadi di depannya nanti. Tidak jarang anak dibuat repot dan kesulitan terlebih ketika anak telah hadir. Bayangkan, mereka masih pada usia anak-anak harus merawat anak. Ketika masih ada banyak hal yang bisa diraih sebelum sampai pada pernikahan.

Lingkaran pertemanan juga berpengaruh pada pernikahan anak. Mereka yang di lingkungan daya saing pembelajaran tinggi, berorientasi tentang masa depan dan pencapaian, juga edukasi tentang pernikahan dini memiliki lebih banyak kesempatan untuk selamat dari pernikahan anak. Berbeda dengan mereka yang memiliki lingkungan pertemanan berkebalikan dengan hal-hal sebelumnya ditambah desakan keluarga dan masyarakat menempatkan anak pada pilihan sulit.

Anak Berhak Menentukan Pilihan dan Bersuara

Sejalan dengan pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Partisipasi dalam hal apapun tak terkecuali dalam menentukan pernikahan dirinya. Anak harusnya diberi kebebasan menyampaikan pendapatnya terkait pilihannya untuk menikah atau tidak. Seorang anak mestinya tidak ditempatkan dalam posisi tidak bisa memilih atau bahkan tidak ada pilihan.

Menikah menyangkut kehidupan seorang ke masa depannya. Orang dewasa, mapan, cukup umur, dan siap dapat memperkirakan ke depannya setelah menikah. Tapi, anak-anak belum tentu bisa. Mereka masih dalam tahap pertumbuhan yang seharusnya diberikan ruang terbaik untuk pengembangan diri. Terlepas dari

bagaimana ekonomi keluarga maupun anak itu sendiri.

Ruang bersuara bagi anak harus hadir di semua aspek kehidupan. Hal ini berkaitan dengan pilihan anak pada hidupnya. Orang lain tidak berhak menentukan jalan hidup anak begitu saja terlebih perihal pernikahan. Mereka yang mengatakan akan menikahkan seorang anak sebelumnya harus mendengarkan apa mau anak. Akan lebih baik secara berkala menanyakan apa impian dan hal-hal yang ingin dicapai. Bukan langsung menempatkan mereka pada jalan menikah.

Alisa Qottrun N.M
mahasiswi Jurusan Sastra
Indonesia 2019

Dok. BP2M 2020
/Wimar

Goa Peteng dan Patung Sunti
di Goa Sunyaragi



Bagian Tersembunyi Goa Sunyaragi

Goa Sunyaragi dibangun pada tahun 1700-an dengan peletakan batu pertama pada tahun 1529 dan menyimpan beragam benda peninggalan yang penuh dengan nilai sejarah.

Dengan beragam destinasi wisata yang ditawarkan, tak heran jika Kota Cirebon acapkali menjadi tujuan utama saat musim libur tiba. Ada banyak destinasi wisata yang menarik untuk dieksplorasi. Salah satu destinasi yang menarik di Kota Cirebon, yaitu Goa Sunyaragi. Tempat ini menjadi rekomendasi bagi mereka yang ingin berwisata di tempat yang sarat dengan nilai sejarah. Goa Sunyaragi menjadi warisan budaya Wewengkon Keraton Kesepuhan Cirebon. Destinasi ini berada tak jauh dari pusat Kota Cirebon—tepatnya di Jalan Sunyaragi No.5, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Di masa pandemi seperti saat ini, tak banyak wisatawan yang bertandang ke situs Goa Sunyaragi. Meskipun demikian, Goa Sunyaragi tetap beroperasi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pengunjung diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan melakukan pengecekan suhu tubuh.

Sejatinya, Goa Sunyaragi merupakan suatu kompleks yang terdiri dari beberapa objek wisata, yaitu Bangsal Jinem, Mande Beling, Cungkup Puncit, Kamar

Panembahan, Kamar Kapuntren, dan Bale Kambang. Selain itu, di dalam kompleks ini juga terdapat beberapa situs gua yang lain, di antaranya: Gua Pengawal, Gua Pendekemasan, Gua Simanyang, Gua Peteng, Gua Langse, Gua Arga Jumut, Gua Padang Ati, Gua Kelanggengan, Gua Lawa, dan Gua Pawon. Tak sampai di situ saja, Goa Sunyaragi juga dilengkapi dengan sejumlah wahana bermain, seperti *flying fox*, sepeda gantung, dan para layang. Namun, karena situasi pandemi, wahana bermain tersebut berhenti beroperasi untuk sementara waktu.

Sejarah dibangun Goa Sunyaragi

Goa Sunyaragi dibangun pada tahun 1700-an dengan peletakan batu pertama pada tahun 1529. Peletakan batu dilakukan di monumen patung gajah—yang menjadi lambang tahun baru Islam. Situs ini dibangun sebagai Taman Ari Keraton Kesepuhan atau Pesantrennya Keraton Kesepuhan. Ide pembangunan Goa Sunyaragi digagas oleh cicit dari Sunan Gunung Jati—Pangeran Emas Zinul Arifin.

Mulanya, Pesanten Keraton Kесе-

puhan berlokasi di Pesanggarahan Nur Giri Saptarengga. Namun, Pesanggarahan tersebut dialih-fungsikan sebagai makam raja-raja. Mulai dari Putri Ong Tien Nio atau Nyai Mas Laras Sumanding—istri dari Sunan Gunung Jati (1483 M), Pangeran Cakrabuana—anak Prabu Siliwangi (1529 M), sampai Sunan Gunung Jati (1586 M). Sejak saat itu, setiap raja yang wafat akan dimakamkan di Pesanggarahan tersebut. Sampai akhirnya, Pesanggarahan Nur Giri Saptarengga benar-benar beralih fungsi menjadi pemakaman raja-raja Cirebon beserta keluarganya—dan berganti nama menjadi Astana Gunung Jati atau Gunung Sembung.

Untuk itu, cicit dari Sunan Gunung Jati—Pangeran Emas Zinul Arifin, berinisiatif untuk membangun Pesanggarahan atau pesantren baru untuk menggantikan Pesanggarahan Nur Giri Saptarengga. Ide tersebut lantas dirundingkan dengan arsitek pembangunan, yaitu Raden Pangeran Sepat—dari Demak, dan Pangeran Losari. Atas prakasa Pangeran Emas Zainul Arifin, pada tahun 1700-an atau abad ke-16, dibangun Pesanggarahan baru yang diberi nama Taman Air Goa Sunyaragi.

Penyematan nama Taman Air Goa Sunyaragi dilatarbelakangi karena pembangunan situs itu berada di tepi Timur Segaran Jati. Kata Segaran sendiri berar-

Dulunya, gua tersebut berfungsi sebagai tempat menyepi. Untuk itu, gua ini diberi nama Gua Sunyaragi, yang berasal dari kata sunyi (sepi) dan raga (raga). Secara keseluruhan, Sunyaragi berarti tempat pengasingan raga atau tempat untuk bertapa.

ti sebuah danau. Sedangkan penamaan Jati diberikan karena banyak pohon jati yang tumbuh di sekitar danau. Pembangunan tempat Pesanggarahan yang baru ini didominasi oleh arsitektur berbentuk gua. Dulunya, gua tersebut berfungsi sebagai tempat menyepi. Untuk itu, gua ini diberi nama Gua Sunyaragi, yang berasal dari kata sunyi (sepi) dan raga (raga). Secara keseluruhan, Sunyaragi berarti tempat pengasingan raga atau tempat untuk bertapa.

Benda Peninggalan di Gua Sunyaragi

Gua Sunyaragi menyimpan beragam benda peninggalan yang penuh dengan nilai sejarah. Benda peninggalan yang paling ikonis di situs ini, yaitu tiga buah patung yang sarat akan filosofi dan mitos. Yang pertama, ada patung Perawan Sunti. Menurut mitos yang berkembang, patung ini memiliki pantangan untuk disentuh oleh anak perempuan yang masih suci—alias perawan. Konon katanya, anak gadis yang menyentuh patung itu akan sulit mendapat jodoh.

Yang kedua, yaitu patung gajah yang terletak di dekat mulut Gua Peteng. Patung ini menjadi tempat peletakan batu pertama sebelum dibangunnya Kompleks Gua Sunyaragi. bentuk gajah melambangkan tahun baru Islam. Dikutip dari laman travel.okezone.com



Patung gajah simbol peletakkan batu pertama dibangunnya Goa Sunyaragi

(19/3/19), menurut Jajat Sudrajat selaku pengelola Gua Sunyaragi, Patung Gajah duduk memiliki hubungan erat dengan dua patung burung yang terletak di Utara dan Selatan ruang panembahan.

“Dua lukisan burung itu adalah simbol putra –putri Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran, yaitu Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Mas Rara Santang, yang memilih pergi dari Kerajaan Pajajaran. Kepergiannya meninggalkan bekas berupa kerutunan dan keraton-keraton Islam. Sedangkan patung gajah duduk menandakan bahwa bekas Kerajaan Pajajaran belum diketahui hingga saat ini,” tutur Jajat—dikutip pada laman yang sama.

Patung yang terakhir, yaitu manusia berkepala garuda yang dililit ular. Menurut Syahrone—penjaga keamanan Goa Sunyaragi, patung ini memiliki filosofi bahwa setinggi atau sekuat apapun manusia pasti hidupnya akan dililit masalah. Selain itu, patung tersebut juga memiliki makna yang ditujukan untuk para pemimpin. Seorang pemimpin yang sudah berkuasa tidak boleh lupa dengan tanggung jawab kepada rakyatnya.

Pengelolaan Goa Sunyaragi

Kompleks Gua Sunyaragi sering dipakai sebagai tempat kegiatan-kegiatan seni di Kota Cirebon, seperti tari topeng, sintren, dan sebagainya. Biasanya, kegiatan tersebut dilakukan pada minggu pertama setiap bulan. Namun, kegiatan tersebut terpaksa ditiadakan karena pandemi.

Gua Sunyaragi dikelola langsung oleh pihak Keraton Kesepuhan tanpa campur tangan dari pemerintah Kota Cirebon. “Untuk pengelolaan Gua sendiri itu, setahu saya masih dari Keraton, kalau dari pemerintah kota sendiri belum ada. Kalau ada, mungkin wisata Goa Sunyaragi tidak seperti sekarang (masih perlu perbaikan)” tutur Syahrone (7/10/20).



Goa Arga Jumut dari Goa Sunyaragi

Dok. BP2M 2020
/Wimar

Saat itu, keadaan Gua Sunyaragi memang tampak sepi dan gersang. Ditambah adanya pandemi membuat wisata ini mengalami penurunan jumlah wisatawan. Hal itu membuat pengelolaan yang dilakukan oleh pihak keraton menjadi tidak maksimal. “Ya seperti ini keadaannya, hanya seadanya, padahal dulu itu di bawah sekitaran itu (Gua Peteng) ada airnya. Karena memang waktu dulu *kan* ini danau, tapi sekarang ya *dibiarin* gersang” tutur Syahrone sambil menunjuk-nunjuk sekitar gua.

Syahrone berharap, pemerintah kota dan keraton bisa bekerja sama dalam pengelolaan Gua. Dengan demikian, Gua Sunyaragi ini bisa dikenal oleh masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah. Lebih-lebih bisa dikenal oleh manca negara sebagai salah satu situs bersejarah yang ada di Indonesia. Sangat disayangkan jika warisan leluhur ini hanya dikenal oleh orang-orang tertentu saja.

Wimar Nurkholipah
Mahasiswa Jurusan Manajemen
angkatan 2019

Mengenal Sosok Dibalik Topeng

Kecintaannya pada dunia tari berhasil menghantarkan Qorry menjadi sosok yang dikenal berprestasi. Perlahan tapi pasti, ia berhasil mewujudkan misinya untuk melestarikan budaya lokal.

Eksistensi tari topeng Cirebon masih bertahan hingga saat ini. Kehadiran media sosial, seolah memberikan ruang untuk tari topeng Cirebon dikenal masyarakat luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Gaya khas tarian yang selalu mengenakan topeng serta dipadukan dengan ritualisasi membuat tarian ini dicintai banyak orang. Hal serupa dirasakan oleh seorang penari muda—Qorry Ashifa Yulandar, 21 tahun, yang mulai mencintai tari topeng Cirebon semenjak ia duduk di bangku SMP. Perkenalannya dengan dunia tari terus berlanjut ketika ia mulai belajar di Keraton Kacirbonan. Tidak main-main untuk membuktikan kecintaannya pada dunia tari, Qorry memutuskan untuk belajar di Sanggar Purwakencana-Losari. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan seni tari di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Qorry mengaku bahwa tari topeng Cirebon sebagian dari jiwanya yang tidak mampu dipisahkan. Baginya tari topeng juga sebagai media penyebaran budaya Cirebon pada masyarakat luas. Sebelum budaya tersebut hilang tertelan zaman, Qorry ingin membuat



Tari Topeng Cirebon di Europalia Festival 2017

masyarakat yakin bahwa tari topeng Cirebon tidak kalah dengan budaya luar. Menonton pagelaran budaya bahkan lebih berharga dari pada sekadar menonton Drakor di kamar.

“Pengen banget selalu ngenalin budaya, terutama tari topeng Cirebon, khususnya untuk anak-anak muda dulu, karena kalau kita sudah kenal pasti rasa suka dan cinta itu muncul sendiri.” tuturnya melalui aplikasi pesan *WhatsApp*. Demi memenuhi tujuannya untuk melestarikan tari topeng Cirebon, Qorry bahkan membuka sanggar tarinya sendiri.

Walaupun masih kecil-kecilan, tapi sanggar tersebut ramai didatangi banyak masyarakat yang tertarik untuk belajar tari topeng Cirebon. Ide membuka sanggar ini bermula ketika ia melihat banyak anak-anak sekitar yang minat belajar tari di sanggar, tapi karena terhambat jarak, akhirnya mereka mengurungkan niat dan memutuskan tidak melanjutkan kegemaran menarinya. Hal itulah yang akhirnya membuat hati Qorry tergerak membuka sanggar pribadi sekaligus bentuk im-

plementasinya melestarikan tari topeng Cirebon.

Suka Duka Bergelut dalam Dunia Tari

Dalam perjalanan karirnya tentu tidak mudah, ada rintangan yang menghadang. Salah satu rintangan yang harus dihadapi Qorry perihal sikap tertutup masyarakat. Tidak jarang juga ia ditolak karena dianggap terlalu kuno, jadul, ketika membawakan tari tradisional. “Karena sifat orang berbeda-beda, ada yang merima kita di lingkungan tersebut, kadang ada juga yang susah menerima” jelas Qorry ketika ditanya suka duka menjadi penari topeng Cirebon.

Namun terlepas dari hambatan yang ia alami, Qorry tak menghentikannya langkahnya mengeluti dunia tari. Karena baginya tari--khususnya topeng Cirebon-- sudah menjadi bagian dari hidupnya, sulit dipisahkan. Ada banyak hal positif yang membuatnya rela bertahan hingga saat ini. Salah satunya karena seni tari membawanya berkenalan langsung dengan Didik Nini Thowok, seorang penari, koreografer, dan pemain pantomim. Seni tari jugalah yang membuat ia keluar sebagai pemenang dalam ajang Nok Kacung Kabupaten Cirebon 2019.

Lebih dari sekadar itu, lewat tari topeng Cirebon, Qorry merasa bisa memahami setiap karakter topeng yang memiliki filosofi manusia. Dari situ ia belajar mengenai kebijaksanaan, kepemimpinan, cinta, bahkan rasa murka yang dimiliki manusia sejak lahir

“ Karena sifat orang berbeda-beda, ada yang merima kita di lingkungan tersebut, kadang ada juga yang susah menerima”

-Qorry Ashifa Yulandar, 21

sampai meninggal. Filosofis tersebut yang kadang menjadi pedoman hidup bagi dirinya sendiri.

Memperkenalkan Budaya Lokal ke Kancan Dunia

Kecintaannya pada dunia tari berhasil menghantarkan Qorry menjadi sosok yang dikenal berprestasi. Perlahan tapi pasti, ia berhasil mewujudkan misinya untuk melestarikan budaya lokal. Qorry mengibarkan sayapnya sampai ke kancan internasional, mengenalkan tari topeng Cirebon hingga ke benua biru.

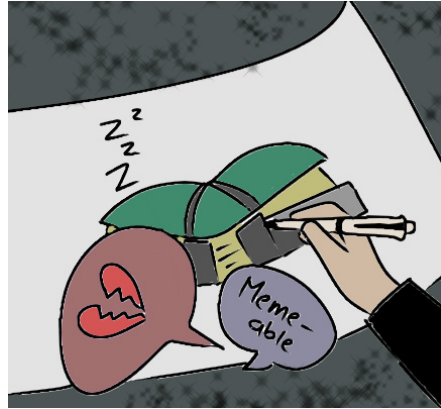
Cerita berawal ketika ia menjadi pemuda perwakilan Indonesia untuk mengisi acara *Europalia Festival 2017*. Selama satu bulan, di kota Brussel, Brugg, Paris Prancis, dan 5 kota di Belgia yaitu Antwerp, Liege, Champagne, Gent, dan Charleroi, ia membawakan tari topeng Cirebon jenis topeng Losari Patih Jayabadra untuk menjadi sajian hiburan disana. Penampilan tarian toponnya mengedepankan tiga gerakan ciri khas yaitu galeong-kayang, pasangan naga seser, dan gantung sikil. Ciri khas gerakan tersebutlah yang akhirnya membedakan tari topeng Cirebon dengan tari topeng daerah lainnya.

Pada acara *Europalia Festival 2017*, Qorry mengaku bangga bisa menjadi salah satu pemuda yang berperan aktif melestarikan budaya bangsa di kancan dunia. Rasa bangganya semakin membuncih ketika penduduk Prancis dan Belgia menyambutnya dengan hangat. Tari topeng Cirebon jenis Losar Patih Jayabadra yang ia bawakan diapresiasi tinggi. Qorry berharap kelak orang lain juga turut mengikuti jejaknya, mencintai budaya Indonesia, khususnya tari topeng Cirebon.

Iis Aisyah
Mahasiswi Bimbingan Konseling
angkatan 2019

Menafsirkan Poster Demo Tolak Omnibus Law

Sindiran-sindiran halus seolah menjadi begitu lucu ketika kita mampu untuk memahaminya.



Ilustrasi: Amilia

Ini era modern dan globalisasi. Banyak hal yang berbau kekinian dari segala lini kehidupan. pikiran manusia menjadi semakin progresif dan berkembang. Terkadang—atau lebih sering, makhluk yang bernama manusia ini suka sekali menyelipkan sesuatu ke dalam sesuatu. Ha? Maksudnya bagaimana?

Jadi, untuk banyak hal, manusia akan kait mengkaitkan isu-isu dengan keseharian yang mereka alami. Misalnya, ketika demo Omnibus Law kemarin, banyak poster yang akan mengaduk-aduk emosi kita sedemikian rupa. Ada yang lucu, ada yang lugu, ada yang kelewat batas, dan yang ala-ala anak mbucin.

Mereka meluapkan kekesalan sekaligus kekecewaan mereka

kepada para pembikin Undang-Undang, yakni Lord anggota DPR yang mulia. Apapun yang ada dalam pikiran, mereka tuangkan dalam bentuk poster-poster penolakan.

Beberapa orang masih menggunakan poster dengan kata-kata yang terkesan biasa dan kurang menarik untuk dibaca tapi proporsional. Seperti poster bertuliskan “#Mosi Tidak Percaya” yang dicetak dengan kertas hvs A4 dengan latar belakang hitam atau poster bertuliskan “Tolak Omnibus Law” yang ditulis dengan spidol hitam permanen pada kertas asturo yang dibentangkan di atas kepala.

Namun, berbeda ketika melihat poster bertuliskan “DPR tidur aja, sekali bangun ngawur” yang dibentangkan di depan dada salah satu anggota serikat buruh

berkacamata hitam. Atau melihat poster “Ada yang sah tapi bukan hubunganku” pada poster seorang mahasiswa yang ikut turun aksi.

Sindiran-sindiran halus seolah menjadi begitu lucu ketika kita mampu untuk memahaminya. Merasa tersentuh ketika kita mampu memahami makna dibaliknya. Ada spektrum emosi yang mewarnai para demonstran di jalanan kota depan gedung gubernur dan DPRD Kota Semarang. Dan saya cuma mau menafsirkan beberapa kata-kata yang unik dan mempunyai makna mendalam bagi siapapun yang jeli melihatnya.

“Pas kerja Tidur, Bangun-Bangun Nyusahin Satu Negara”

Ini sih parah banget tapi sesuai realita. DPR dengan gedung mewah

dengan segala kenya-manannya bukannya mempermudah kinerja rapat supaya menghasilkan produk undang-undang yang bermutu sesuai kehendak dan kebutuhan masyarakat, eh malah dipakai buat tempat tidur. Belum lagi yang hanya sekadar ~~nitip nama~~ absen.

Dalam pengesahan RUU Cipta Kerja, dari 575 orang, yang hadir hanya 318 kepala saat rapat paripurna DPR Senin, 5 Oktober 2020. Dan dari 318 orang itu, entah berapa yang tertidur saat rapat. Anggota DPR kalau mau tidur saat rapat harus bisa seperti Gus Dur. Kalau kata Bang Iwan Fals: *Wakil rakyat/seharusnya rakyat/jangan tidur waktu sidang soal rakyat*. Tetapi, kalau sekiranya kerja membuat keresahan, ya sudah lebih baik tidur saja.

Benar kata Dzawin Nur, seorang komika alumnus SUCI (Stand Up Comedy Indonesia) musim 4 yang mengatakan bahwa sebaiknya gedung DPR dibangun pada kawasan sekitar pasar atau kawasan kumuh. Untuk memahami penderitaan, kau harus menjadi bagian dari penderitaan itu. Dengan begitu, DPR bisa merasakan secara langsung siapa-siapa yang merdeka wakikan. Bukan

“
Kalau kata Bang Iwan Fals: *Wakil rakyat/seharusnya rakyat/jangan tidur waktu sidang soal rakyat*. Tetapi, kalau sekiranya kerja membuat keresahan, ya sudah lebih baik tidur saja.

hanya sekadar membaca data laporan dan statistik-statistik belaka.

“Gaji Dibayar Per Jam? Lu Kira Open BO?”

Kalau ini menyinggung pada pasal 88 B Omnibus Law yang berbunyi: *Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu; dan/atau satuan hasil*. Baca ya, S-A-T-U-A-N-W-A-K-T-U. Satuan waktu yaitu detik, menit, jam, minggu, bulan, dan sebagainya. Pasal ini dikhawatirkan membuat korporasi memberikan upah dengan hitungan satuan waktu.

Open BO? Mengapa dikaitkan dengan Open BO? Open BO merupakan singkatan dari Open Booking Online, istilah populer yang cabul dan melekat bagi penikmat jasa *esek-esek* via *online*. Orang akan membayar tarif dengan hitungan jam

atau semalaman. Nah, salah satu tuntutan yang disuarakan dalam aksi tolak Omnibus Law adalah kekhawatiran para buruh yang dipukul rata upahnya dengan sistem pengaturan upah nyang dibayar per jam.

Menyadur dari *Suara.com*, Direktur Pengupahan Kemenaker, Dinar Titus Jogaswitani pada Rabu (7/10/2020) menegaskan bahwa aturan sistem upah per jam di dalam Omnibus Law Cipta Kerja belum diatur. Sehingga diperlukan adanya turunan dari Peraturan Pemerintah. Lho, bukannya Omnibus itu memangkas peraturan yang seabrek menjadi satu?

“Turunkan Nabi Isa”

Melihat poster bertuliskan demikian, saya langsung senyum-senyum sendiri memahami makna di balik ungkapan yang tertulis pada poster tersebut. Mungkin, bagi sebagian golongan yang menganut paham islamisme *buaanget* akan merasa agak tersinggung karena membawa-bawa nama nabi.

Benar, dalam Islam salah satu rukun imannya adalah percaya akan hari akhir. Di mana sebelum akhir itu datang, muncul tanda-tanda yang telah disebutkan dalam Alquran maupun hadis. Dan

turunnya nabi Isa adalah salah satu tandanya. Sebagaimana kita tahu, dalam Alquran surah Az Zukhruf ayat 57-61 dan hadis HR. Muslim: Kitabul iman no. 225, nabi Isa turun untuk meneruskan dakwah nabi Muhammad SAW dan mengalahkan makhluk penebar kekacauan di bumi bernama Dajjal.

Tuntutan untuk menurunkan nabi Isa yang tertulis pada poster saat aksi demonstrasi bukanlah untuk meminta datangnya hari kiamat lebih cepat (naudzubillah), tetapi sindiran keras bahwa ada orang-orang

atau golongan yang kerap mengundang kekacauan di suatu negeri dan perlu untuk dibasmi. Dan orang-orang atau golongan itu adalah... (kalian tahu sendiri lah, ya).

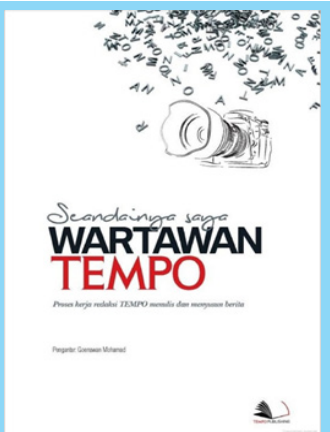
Banyak sekali poster yang beredar waktu aksi penolakan Omnibus Law kemarin. Tentunya, tafsir tersebut hanya apa-apa yang ada dalam pikiran saya. Dan tentunya pula, akan membutuhkan tulisan sedemikian panjang untuk menafsirkan semua. Bahkan menjadi berlembar-lembar halaman (seperti halnya UU Cipta Kerja) atau ber-ek-

semplar buku.

Sungguh fenomena yang unik. Kini, mahasiswa, buruh, dan segala yang ikut serta dalam aksi telah mengemas bentuk penolakan dengan kata-kata ciamik yang mampu mengaduk-aduk emosi pembacanya. Ekspresi begitu bebas untuk dituangkan, begitupun curahan hati. Karena tidak seperti DPR, nilai dan ekspresi nurani masih ada di jalanan aksi itu.

Abdul Manan
Mahasiswa Program
Studi Ilmu Politik
angkatan 2019

Resensi



Menilik Rahasia Tulisan Tempo

Judul Buku:

Seandainya Saya Wartawan Tempo

Penulis:

Goenawan Mohamad

Tahun Terbit:

Januari, 2017

Penerbit:

Tempo Publishing

Tebal Buku:

viii + 96 halaman

Ketika menyoal penyajian berita, masyarakat pasti sudah terbiasa disuguhi pembawaan berita yang lempeng. Agaknya, gaya penulisan semacam itu sudah lama menjejaki dunia perwartaan Indonesia.

Hampir semua majalah dan koran kala itu mengusung model penulisan kaku—*straight news*. Sampai akhirnya *Tempo* hadir dengan membawa gebrakan baru dalam bidang kepenulisan. Para awak *Tempo* merintis ragam penulisan anyar yang dikenal dengan istilah *feature*.

Seluk beluk tentang *feature*, baik dari hakikat sampai cara penulisan, bisa dijumpai pada buku berjudul *Seandainya Saya Wartawan Tempo*. Buku ini digarap langsung oleh jurnalis ulung, sekaligus pendiri *Tempo*—Goenawan Mohamad. Karena hanya berjumlah 96 halaman, tak butuh waktu lama bagi pembaca untuk melahap buku ini. Hal ini karena penulis menyajikannya dengan bahasa yang padat dan informasi yang ketat. Bisa dikatakan, setiap kalimat mengandung informasi. Jadi, ketika melewati satu kalimat, berarti sudah melewati sebuah informasi.

Pada cetakan kelima—yang terbit tahun 2017, terdiri atas 10 bab yang berhasil mengulik tuntas segala hal tentang *feature*. Mulai dari hakikat, sejarah, modal, teknik, dan segenap elemen lain terkait ragam kepenulisan ini. Di beberapa kesempatan, penulis juga menyelipkan cerita yang berkenaan dengan cara kerja redaksi—khususnya *Tempo*, atau sekadar keluh kesah yang dialami wartawan TEMPO tat kala menggarap sebuah tulisan.

Troboosan dalam Kepenulisan

Sebelum *Tempo* berdiri, jagat perwartaan didominasi oleh penyajian berita secara *straight news*. Hampir semua media menggunakan gaya penulisan berita yang lempeng, kaku, dan ringkas. Struktur penulisan juga masih berpegang pada konsep piramida terbalik. Akibatnya, produk yang dihasilkan terkesan membosankan dan tidak tahan lama.

Sampai akhirnya, *Tempo* hadir den-

Tempo hadir dengan menyajikan cara penulisan yang beda sama sekali—yang sekarang jadi pola penulisan jurnalistik di Indonesia (dan sering tidak pada tempatnya dipakai): bagaimana menyusun berita tentang sebuah kejadian sebagai sebuah cerita pendek (halaman vii).

gan mengusung troboosan baru dalam penyajian berita. Goenawan Mohamad—bersama wartawan *Tempo* lainnya, menawarkan penyuguhan berita yang memiliki nilai “kisah” di dalamnya. Jenis tulisan ini juga menampilkan pembawaan berita yang “menghibur”. Perlu digarisbawahi, kata “menghibur” terbatas pada penyajian berita yang enak dibaca, tanpa menghilangkan unsur faktual.

Tempo hadir dengan menyajikan cara penulisan yang beda sama sekali—yang sekarang jadi pola penulisan jurnalistik di Indonesia (dan sering tidak pada tempatnya dipakai): bagaimana menyusun berita tentang sebuah kejadian sebagai sebuah cerita pendek (halaman vii).

Format penulisan anyar tersebut tidak serta-merta ditemukan. Para awak *Tempo* mesti melalui serangkaian proses yang panjang. Bahkan, Goenawan Mohamad harus berguru pada rekannya—George Taber, dan orang-orang di majalah *Times New York*. Lantas ia mengadaptasi gaya penulisan dari dunia barat itu—yang kemudian dikenal dengan nama *feature*.

Tak-tik “Mengawetkan” Tulisan

Berita mudah sekali “punah”, tapi *feature* bisa disimpan berhari, berminggu, atau berbulan-bulan (halaman 8).

Bisa dikatakan, *feature* menjadi

resep mujarab yang untuk “mengawetkan” tulisan *Tempo*. Koran biasa akan kehilangan kualitas substansi ketika dibaca di hari berikutnya. Tapi berbeda dengan produk tulisan *Tempo* yang masih relevan untuk dibaca—bahkan sampai hari ini. Hal itu tak lepas dari unsur *in depth* yang ada pada *feature*. Dengan menonjolkan kedalaman informasi dan “nilai cerita”, membuat tulisan tidak akan musnah dimakan waktu. Selain itu, aspek “menghibur” pada *feature* menjadi privilese dalam hal keketatan waktu dan aktualitas.

Beberapa aspek di atas menjadikan *feature* sebagai senjata yang ampuh dalam “mengawetkan” tulisan. Bahkan, *feature* bisa menjadi kunci untuk mempertahankan eksistensi surat kabar di tengah perkembangan teknologi.

Jurus Jitu Menulis *Features*

Sesuai dengan namanya—*Seandainya Saya Wartawan Tempo*, buku ini seolah membawa pembaca memasuki atmosfer menjadi wartawan *Tempo*. Terutama bagaimana wartawan *Tempo*

mengolah sebuah tulisan. Goenawan Mohamad membagikan jurus jitu untuk menulis *feature* yang baik. Bisa dibilang, buku ini merupakan paket lengkap untuk belajar kepenulisan. Serentetan hal tentang penulisan *feature* menjelma dalam sebuah buku.

Mulanya, buku ini ditujukan untuk *intern Tempo* semata. Tapi akhirnya diterbitkan untuk umum. Dengan dipublikasikannya buku ini, diharapkan mampu menularkan keterampilan menulis dan jiwa yang bebas kepada pembaca. Buku ini sangat cocok dibaca untuk orang-orang yang ingin mendalami *feature*. Pembawaan yang mengalir serta pembubuhan contoh pada setiap penjelasan, membuat buku ini juga relevan dibaca oleh orang awam—yang ingin bercengkrama dengan dunia kepenulisan, lebih-lebih pada jagat jurnalistik.

**Laili Ayu Ramadhani Mahasiswa
Jurusan Pendidikan Bahasa
Indonesia 2019**

Cerpen

Lela Lela Ledhung

Oleh: Laili Ayu
Ramadhani

“*Tuk lela... Lela... Lela ledhung.*” Terdengar sayup-sayup lantunan lagu di tengah derasny hujan.

“*Tak lela... Lela... Lela ledhung.*” lagi-lagi, Asih melantunkan lagu itu.

“*Tak lela... Lela... Lela ledhung.*” bibir



mungil itu masih merapal lagu di bagian yang sama. Entah karena menyukainya, atau karena ia hanya menghafal bagian itu.

Malam ini, saat butir-butir air menghujam bumi

tanpa ampun, Asih menyanyikan lagu untuk ibunya. Sesekali, bocah yang belum genap empat tahun itu, membenarkan anak rambut sang ibu yang diterpa angin dari

ventilasi. Di luar, hujan turun dengan lebat, angin bertiup kencang, alam sedang riuh. Tapi lihatlah. Ibunya tak terganggu sedikit pun.

“Mungkin Ibu kelelahan,” pikir Asih sembari menatap sang ibu lambat-lambat. Ia bisa melihat garis usia yang terukir di wajah yang lelap itu. Di bagian dahi, pangkal hidung, dan samar-samar di sudut mata. Padahal usianya belum sampai setengah abad.

Asih kembali menembangkan lagu andalannya. Ya, di bagian yang sama, “*Tak Lela... Lela... Lela ledhung.*”

Asih sudah terbiasa mendengar kidung itu. Sang ibu selalu menyanyikannya, hampir setiap hari, terlebih saat meninabobokan dirinya. Seolah menjadi mantra yang ampuh untuk menidurkan Asih, membawanya ke dunia angan. Sang ibu menyanyikannya dengan lebih merdu, dan tentu saja, lebih lengkap—tak hanya mengulang bagian itu-itu saja.

Tapi malam ini berbeda. Ibunya sudah terlelap lebih dulu. Jadi, Asih lah yang melantunkannya, masih pada bagian yang sama. Asih mengusap tangan ibunya. “Bu, tanganmu dingin. Ibu kedingin-an, *to?*” tanya gadis kecil itu. Sang ibu tak berkutik. Matanya masih terkutup rapat. Mulut-

Asih sudah terbiasa mendengar kidung itu. Sang ibu selalu menyanyikannya, hampir setiap hari, terlebih saat meninabobokan dirinya.

ya sedikit terbuka, tapi mengeluarkan satu kata sekalipun. “Mungkin Ibu kelelahan,” pikir Asih, sekali lagi.

Gadis kecil itu mengambil selimut dan menggelarnya di atas tubuh sang ibu. “Ibu capek? Mau Asih pijat?” tanya Asih. Tangan mungilnya mulai memijat lengan sang ibu, bahkan sebelum wanita paruh baya itu menyahut. Sepuluh menit berselang, Asih berpindah ke sisi lain kasur untuk memijat kaki ibunya.

“Besok jadi ke pasar *kan*, Bu? Asih *ndak* sabar mau beli sepatu. Beli yang ada pitanya. Warnanya apa *ya*, Bu? Merah atau biru?” celoteh Asih. Matanya menerawang ke depan. Terlihat setitik binar di sana, seolah tidak sabar menantikan hari esok.

Di luar, hujan belum mereda. Petir sesekali menampakkan dirinya. Membawa terang sekelebat bersama bunyi gemuruh. Asih masih memijat

kaki ibunya. Sesekali mengoceh tentang berbagai hal. Sampai akhirnya, gadis kecil itu menguap. Asih mengantuk, mungkin juga kelelahan. Ia memutuskan berbaring di samping sang ibu. “Tbu pasti lelah, *kan?*” tanya Asih, ibunya bergeming.

Iya. Mungkin ibunya memang kelelahan. Petang tadi, Asih mendengar ibu dan bapaknya adu mulut. Suara dengan nada tinggi saling bersahutan dari dalam kamar. Pintunya tertutup, tapi suaranya terdengar sampai luar. Bukan hal baru bagi Asih untuk mendengar orang tuanya berselisih. Ketika hal itu terjadi, ia akan mengungsi ke rumah tetangga sebelah rumahnya.

Petang itu pun sama. Dengan membopong boneka kesayangannya, gadis kecil itu mengungsi. “Orang tuamu ribut lagi, *ya?*” tanya tetangganya. Asih tak mengubris. Wajah gadis itu termangu memandangi rumahnya. Sayup-sayup, suara dengan nada tinggi masih terdengar. Asih tak mengerti betul hal yang diributkan ibu dan bapaknya. Ia hanya mendengar suara bentakan, dan satu-dua teriakan frustrasi.

Hingga selepas magrib, riuh suara itu perlahan teredam. Asih

berpikir mungkin masalah yang diributkan orang tuanya sudah selesai. Itu artinya, ia harus pulang. “Bu Dhe, Asih pulang dulu, ya,” pamit Asih.

“Iya, Nduk. Mau Bu Dhe antar?” tanya tetangganya.

“*Ndak* usah, Bu Dhe.” jawab Asih sambil melangkah pergi.

“Hati-hati, Nduk,” jawab si tetangga. Gadis itu sudah keluar. Mendung membuat malam semakin gelap. Angin yang berhembus membawa titik-titik air. Gerimis. Asih yang semula berjalan, kini berlari tunggang langgang.

Asih tiba di rumah dengan keadaan setengah kuyup. Di teras rumah, ia bertemu dengan bapaknya. Pria berkumis tipis itu sedikit terkejut dengan kedatangan Asih. Wajah bapaknya terlihat pasi, napasnya sedikit terengah dan, jika diperhatikan lebih seksama, tangannya sedikit gemetar. Tetapi

Asih terlalu kecil untuk menyadari gerak-gerik itu. Terlebih, ia terlalu polos untuk mengartikannya.

“Bapak mau kemana?” tanya Asih.

Si empu yang ditanya tidak menjawab. Asih tidak terkejut. Ia sudah terbiasa diabaikan. Pria itu melangkah pergi, setengah berlari menerobos hujan. Asih mengamati bapaknya yang pergi. Deras air mengaburkan sosok itu. Sebelum akhirnya, benar-benar hilang di kelokan. Asih masuk ke dalam rumah. Menengok sang ibu di kamar. Wanita itu terlihat berbaring di kasur. Ibunya tertidur. Matanya terpejam. “Mungkin Simbok kelelahan,” pikir gadis itu.

Hujan masih mengguyur. Bapaknya masih pergi. Pun ibunya masih terlelap. Rasa kantuk mulai hinggap pada diri Asih. Beberapa kali ia menguap. Gadis itu menyudahi pijatan di kaki ibunya. Mer-

angkak ke sisi kasur yang kosong, lalu berbaring di sana. Memejamkan mata, meski banyak hal berkecamuk di pikirannya. Terutama, perasaan tidak sabar untuk membeli sepatu baru besok pagi.

Hawa dingin mulai menyergap. Asih merengkuh di samping ibunya. Mendekap lengan sang ibu, mencoba mencari kehangatan. Asih tak menemukannya, lengan itu dingin. Kehangatan perlahan mulai pergi dari tubuh wanita itu. Tapi Asih tak menyadari, atau lebih tepatnya tidak mengerti. Ia kembali melantunkan kidung andalannya, di bagian yang tak pernah berubah.

“Tak Lela... Lela... Lela ledhung,” suaranya semakin lirih, seiring kesadarannya yang menghilang. Gadis itu terlelap. Di samping ibu yang telah pergi dalam senyap.
Tamat.



> Gerbang gedung DPRD Jawa tengah roboh karena massa berusaha menerobos masuk.
(Doc. BP2M/Lalu)

Foto Esai

Bingkai Aksi Tolak Omnibus Law di Semarang

Pengesahan UU Cipta Kerja menandai sederet aksi penolakan di berbagai daerah. Hal serupa juga terjadi di Semarang (7/10). Massa aksi yang terdiri dari sejumlah elemen—mulai dari buruh, mahasiswa, pelajar, sampai warga sipil—melakukan aksi

demo di depan gedung DPRD Jawa Tengah. Di kutip dari laman *Kompas.com* (8/10), gerbang gedung DPRD Jawa Tengah berhasil dirobohkan oleh massa pada pukul 12.17 WIB. Insiden ini menyebabkan beberapa mahasiswa dan pihak kepolisian terluka.

Situasi semakin memanas ketika terjadi aksi pelemparan batu yang dilakukan oleh demonstran. Bentrok tak terhindarkan. Massa aksi berhasil dipukul mundur setelah aparat menembakkan *water canon* dan gas air mata. Pembubaran paksa diwarnai tindak represif dari aparat. Sejumlah orang ditangkap dan diamankan di Polrestabes Semarang. “Sudah kita amankan mereka dan menjalani pemeriksaan di Polrestabes Semarang. Ada sekitar 50 sampai 100-an orang,” ujar Kapolrestabes Semarang—Kombes Auliansyah Lubis, diikuti dari sumber yang masih sama. [Laili]



Aparat keamanan melemparkan **water canon** karena situasi semakin chaos.
(Doc. BP2M/Adam)



Penangkapan sejumlah massa aksi yang diwarnai tindak represif dari aparat.
(Doc. BP2M/Lalu)



Kami segenap anggota BP2M Unnes menyatakan selamat kepada mahasiswa yang lulus seleksi magang BP2M 2020



Massa aksi tolak omnibus law berkumpul di depan gedung DPRD Jawa Tengah (7/10).
(Doc. BP2M/Doni)

“Karena Asumsi itu **Membunuh**”

Daripada banyak berasumsi,
mending baca berita kami.



Pindai dan jelajahi

linikampus.com



bp2munnes



BP2M UNNES